



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. GUNAWAN SYUKUR**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU I**
3. NHK : **655175**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.435.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m2/160 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/90 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 40000 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 25000 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 150000 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/192 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 98.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU ROKCY / F72 MOPEN JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 35.750.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.818.750.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.818.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

